

**LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKJIP)
TAHUN 2020**



**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BOJONEGORO
TAHUN ANGGARAN 2020**

DAFTAR ISI

	Halaman
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	
DAFTAR ISI	
DAFTAR TABEL	
I. PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. MAKSUD DAN TUJUAN	2
C. LANDASAN HUKUM	3
D. SISTEMATIKA	3
E. STRUKTUR ORGANISASI	4
II. PERENCANAAN KINERJA	7
III. AKUNTABILITAS KINERJA	13
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	13
B. REALISASI ANGGARAN	20
C. CAPAIAN INDIKATOR SASARAN RPJMD	21
IV. PENUTUP	22
LAMPIRAN :	
*PERJANJIAN KINERJA	
*PIAGAM PRESTASI SKPD TERKAIT DENGAN TUGAS DAN FUNGSI	
*LAIN-LAIN YANG DIANGGAP PERLU	

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas karunia Nya sehingga Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2020 dapat terselesaikan meskipun masih ada yang kurang sempurna, hal ini untuk melaksanakan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan kinerja tersebut merupakan dari rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang sudah berjalan mulai dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bojonegoro tahun 2018 - 2023, Rencana Kerja Tahun (RKT) dan Penetapan Kinerja (PK) Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Untuk mencapai Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018 - 2023 yang tertuang pada Visi Kabupaten Bojonegoro yaitu **“Menjadikan Bojonegoro sebagai Sumber Ekonomi Kerakyatan untuk terwujudnya Masyarakat yang Beriman, Sejahtera dan Berdaya Saing”**. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berdasarkan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka percepatan pencapaian sasaran rencana strategis Kabupaten Bojonegoro mempunyai Visi yaitu : **“Terwujudnya Tata Kelola Keuangan Daerah Secara Profesional, Transparan, Inovatif dan Akuntabel Menuju Pemerintahan Yang Bersih dan Berwibawa”**.

Berdasar visi dan misi yang tertuang dalam Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro, maka laporan kinerja yang dicapai adalah sebagai berikut :

- | | |
|--------------------------|--|
| Misi ke 2 (dua) | : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Bertanggungjawab. |
| Tujuan | : Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah dan Barang Milik Daerah. |
| Sasaran | : Terwujudnya tertib Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pengelolaan Barang Milik Daerah. |

Untuk mengukur pencapaian sasaran tersebut adalah melalui indikator sebagai berikut :

1. Nilai SAKIP;
2. Opini BPK;
3. Survey Kepuasan Masyarakat;
4. Indeks Profesionalitas ASN; dan
5. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Demikian laporan ini dibuat dan diharapkan dapat menjadi sarana evaluasi, baik dalam perbaikan pelaksanaan pekerjaan maupun dalam perjanjian kinerja demi terwujudnya Tata Kelola Keuangan Daerah secara profesional, transparan, inovatif dan akuntabilitas menuju Pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Bojonegoro, 31 Desember 2020

**Pj. KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BOJONEGORO**



NIP. 19691128 200312 2 008

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Menghadapi perkembangan jaman saat ini, Pemerintah memiliki tanggungjawab yang sangat besar dan dituntut untuk memberi pelayanan yang terbaik, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro berupaya untuk memberikan pelayanan yang baik dan berkoordinasi dengan unit kerja lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi pokok yang diamanatkan berdasarkan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2020 merupakan media untuk memberikan gambaran tentang Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018 - 2023.

Sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertugas mengkoordinasikan perumusan kebijakan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro kinerjanya diukur berdasarkan kontribusi yang dihasilkan dalam menunjang tercapainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Bojonegoro yang telah tertuang dalam Penetapan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tahun 2020.

Sebagai perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan Pemerintahan, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro berkewajiban mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang telah dilaksanakan. Pertanggungjawaban tersebut diwujudkan dalam Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro pada Tahun 2020 telah melaksanakan Program dan Kegiatan dalam rangka mencapai tujuan meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan meraih predikat WTP Opini BPK atas LKPD sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut. Sebagai wujud pertanggungjawaban terhadap kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Bojonegoro tahun 2020, maka disusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP).

Hal terpenting dari latar belakang penyusunan Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro selain memenuhi tuntutan untuk berakuntabilitas adalah adanya keinginan yang kuat dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk mewujudkan keseimbangan antara Akuntabilitas, Partisipasi dan Transparansi yang merupakan pilar perwujudan tata pemerintahan yang baik.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro adalah media pertanggungjawaban Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang di dalamnya berisi informasi mengenai kinerja. Dalam Laporan Akuntabilitas ini diuraikan hasil evaluasi berupa analisis akuntabilitas kinerja sasaran dalam rangka mewujudkan tujuan, misi dan visi sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018 - 2023.

Maksud dan tujuan dari Penyusunan Laporan Akuntabilitas ini adalah untuk memberikan kontribusi dalam pengambilan keputusan manajemen dalam upaya peningkatan kinerja (*performance improvement*) baik dalam bentuk regulasi, distribusi dan alokasi sumberdaya yang dimiliki Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Evaluasi terhadap capaian kinerja ditujukan untuk :

1. Memberikan informasi capaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diembannya;
2. Memberikan bahan evaluasi sebagai masukan untuk peningkatan akuntabilitas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro;
3. Umpan balik bagi peningkatan kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro;
4. Peningkatan kredibilitas terhadap pemberi wewenang;
5. Mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas, sehingga tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dapat dilaksanakan lebih efektif, efisien dan responsif.

Untuk mengantisipasi perkembangan yang sedang dan akan terjadi, maka faktor-faktor internal dan eksternal telah dipertimbangkan guna menyesuaikan dengan perkembangan yang begitu cepat. Perubahan lingkungan strategis baik dari internal, regional, nasional maupun Global memiliki andil dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dengan demikian untuk meningkatkan

kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro harus dengan mempertimbangkan faktor-faktor kelemahan (*Weakness*) dan memanfaatkan kekuatan (*Strenght*) dari faktor internal yang ada untuk dapatnya memanfaatkan peluang (*Opportunity*) dan dapat mengatasi ancaman (*Threat*) yang mungkin terjadi. Dengan demikian posisi dalam mengkoordinasikan perumusan kebijakan di Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dapat mengambil peran sesuai dengan hasil analisis baik dari lingkungan internal maupun eksternal.

C. LANDASAN HUKUM

Dalam menyusun Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro memperhatikan berbagai Peraturan Perundang - Undangan antara lain :

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

D. SISTEMATIKA

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Executive summary (Ikhtisar Eksekutif)

Daftar Isi

Daftar tabel

Bab I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Landasan Hukum, Sistematisa, Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Kondisi Pegawai dan Sarana Prasarana.

Bab II : PERENCANAAN KINERJA

Bab ini berisi gambaran umum uraian Rencana Strategis yang menjabarkan Visi, Misi dan Tujuan serta Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2020, serta Penetapan Kinerja Tahun 2020 yang memuat program, kegiatan dan target capaian dalam upaya pencapaian Sasaran Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah.

Bab III : AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini berisi uraian skala pengukuran Capaian Kinerja dan Analisis Kinerja atas capaian Indikator Kinerja Utama yang tercantum dalam Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Selain itu disajikan pula akuntabilitas keuangan yang menggambarkan realisasi anggaran dalam mendukung pelaksanaan kegiatan tahun 2020 terkait dengan tugas pokok dan tugas-tugas strategis lainnya.

Bab IV : PENUTUP

Bab ini berisi ringkasan dari tinjauan pelaksanaan Kegiatan dan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2020 yang dirangkum ke dalam kesimpulan terhadap Akuntabilitas Kinerja serta Rencana Tindak Lanjutnya.

Lampiran-lampiran

Lampiran Perjanjian Kinerja;

Lampiran Piagam Prestasi SKPD terkait dengan tugas dan fungsi;

Lampiran Lain-lain yang dianggap perlu.

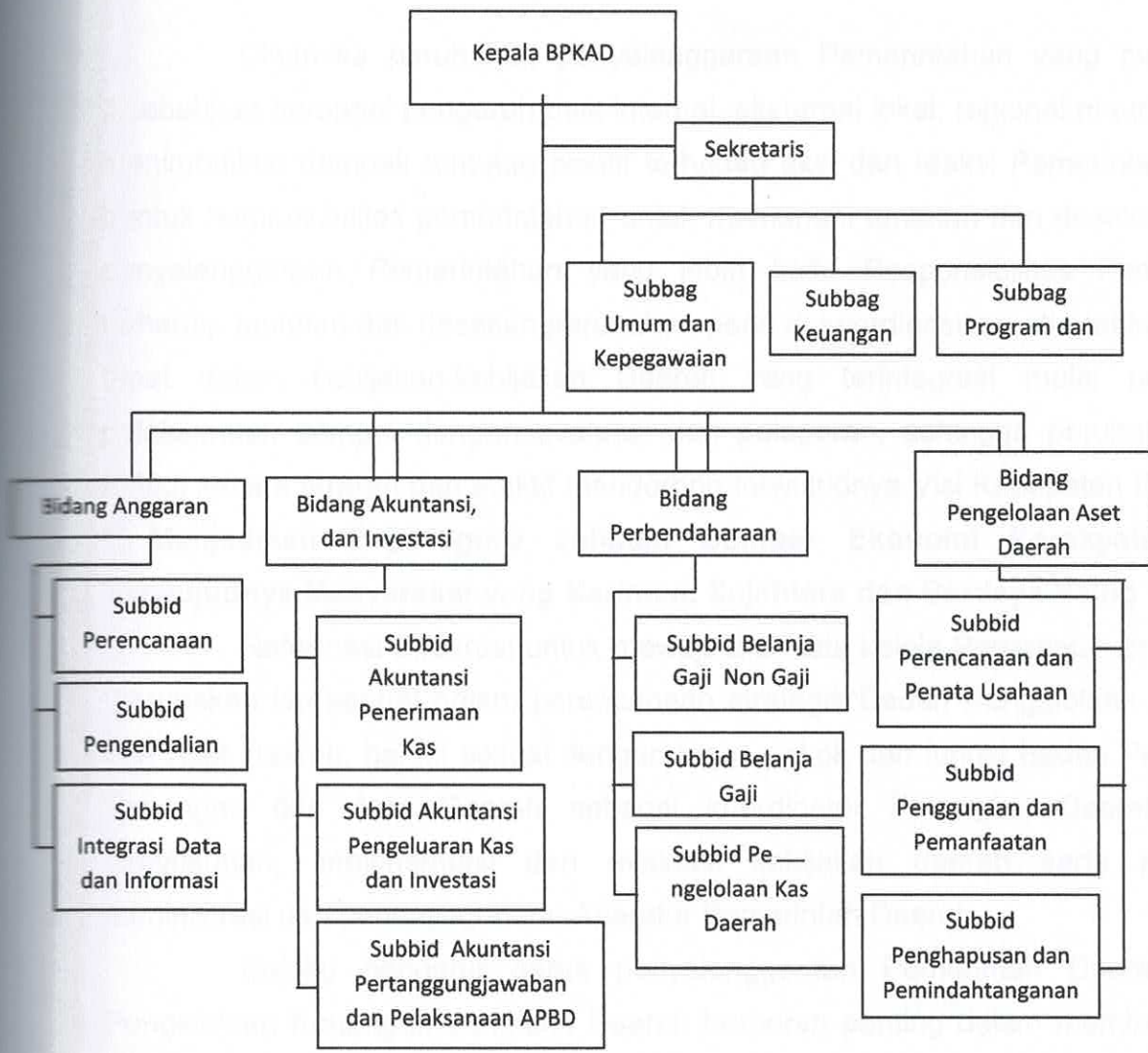
E. STRUKTUR ORGANISASI

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro adalah SKPD yang mempunyai tugas mewujudkan pelaksanaan Otonomi Daerah, khususnya sejalan dengan upaya menciptakan Pemerintahan yang bersih, bertanggungjawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata kelola Pemerintahan yang baik.

Sesuai Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 74 Tahun 2016 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang Keuangan dan Aset Daerah;
 - b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Keuangan dan Aset Daerah;
 - c. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Keuangan dan Aset Daerah;
 - d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di bidang Keuangan dan aset Daerah;
 - e. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Bupati, terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (1) Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terdiri atas :
- a. Kepala Badan.
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Program dan Laporan.
 - c. Bidang Anggaran membawahi :
 1. Sub Bidang Perencanaan;
 2. Sub Bidang Pengendalian; dan
 3. Sub Bidang Integrasi Data dan Informasi.
 - d. Bidang Akuntansi dan Investasi, membawahi :
 1. Sub Bidang Akuntansi Penerimaan Kas;
 2. Sub Bidang Akuntansi Pengeluaran Kas dan Investasi; dan
 3. Sub Bidang Akuntansi Pertanggungjawaban dan Pelaksanaan APBD.
 - e. Bidang Perbendaharaan, membawahi :
 1. Sub Bidang Belanja Non Gaji;
 2. Sub Bidang Belanja Gaji; dan
 3. Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah.
 - f. Bidang Pengelolaan Aset Daerah, membawahi :
 1. Sub Bidang Perencanaan dan Penatausahaan;
 2. Sub Bidang Penggunaan dan Pemanfaatan; dan
 3. Sub Bidang Penghapusan dan Pemindahtanganan.

Sedangkan Bagan Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro adalah sebagaimana disajikan sebagai berikut :



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Dinamika perubahan penyelenggaraan Pemerintahan yang menyeluruh, disebabkan berbagai pengaruh baik internal, eksternal lokal, regional maupun global, menimbulkan dampak tuntutan positif terhadap aksi dan reaksi Pemerintah sebagai bentuk tanggung jawab pemerintahan untuk memenuhi tuntutan dan desakan ke arah penyelenggaraan Pemerintahan yang lebih baik. Tanggung jawab Pemerintahan terhadap tuntutan dan desakan perubahan perlu di koordinasikan, di arahkan dengan tepat dalam kebijakan-kebijakan Daerah yang terintegrasi mulai perumusan, pelaksanaan sampai dengan evaluasi dan pelaporan, sehingga perubahan dapat terjadi secara terarah dan efektif mendorong terwujudnya Visi Kabupaten Bojonegoro “ **Menjadikan Bojonegoro sebagai Sumber Ekonomi Kerakyatan untuk Terwujudnya Masyarakat yang Beriman, Sejahtera dan Berdaya Saing** ”

Reformasi Birokrasi untuk mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik merupakan isu sentral dalam perencanaan strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, hal ini sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai koordinator Perangkat Daerah. Proses penyusunan, implementasi dan evaluasi kebijakan daerah serta pembinaan administrasi dan pendayagunaan Aparatur Pemerintah Daerah.

Selaku pengatur gerak penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berperan penting dalam membangun dan mensinergikan ke satuan arah pandangan dan mekanisme gerak tujuan OPD. Semakin tinggi tuntutan dan kebutuhan masyarakat atas bentuk dan kualitas pelayanan, perlu di akomodasikan dalam bentuk respon positif melalui pengaturan, pengendalian dan pengkoordinasian kebijakan daerah secara tepat dan cepat.

Dengan proses yang teratur, terkendali dan terkoordinasi mulai dari tahapan penyusunan kebijakan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan sampai dengan pelaporan akan memudahkan pemerintah untuk terus mengevaluasi diri dan kinerja pemerintahannya, yang pada gilirannya secara terus menerus dapat terkoreksi dan mendorong terciptanya perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan pemerintahan.

• VISI

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2019 Visi Kabupaten Bojonegoro adalah sebagai berikut :

“ Menjadikan Bojonegoro sumber ekonomi kerakyatan dan sosial budaya lokal untuk terwujudnya masyarakat yang beriman, sejahtera dan berdaya saing “

• MISI

Misi Kabupaten Bojonegoro berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018 - 2023 adalah :

1. Mewujudkan tata kehidupan sosial yang berlandaskan nilai-nilai religius dan kearifan local;
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan bertanggungjawab;
3. Mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkelanjutan;
4. Mewujudkan rasa aman dan keperpihakan bagi perempuan, anak, penyandang disabilitas serta kaum dhuafa;
5. Mewujudkan peningkatan kesejahteraan berbasis ekonomi kerakyatan dan ekonomi kreatif;
6. Mewujudkan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi local; dan
7. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang merata dan ramah lingkungan.

Sebagaimana Visi dan Misi yang telah ditetapkan untuk keberhasilan pencapaian visi misi tersebut, perlu ditetapkan tujuan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang ditempuh melalui penetapan beberapa sasaran yang satu dengan lainnya saling berhubungan. Hubungan Misi, Tujuan dan Sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah sebagai berikut :

Tujuan 1 : Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah dan Barang Milik Daerah.

Sasaran 1 : Terwujudnya tertib Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sasaran 2 : Terwujudnya tertib Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Kebijakan merupakan arah/tindakan yang harus di pedomani OPD dalam melaksanakan strategi mencapai tujuan Renstra OPD. Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Kebijakan merupakan cara untuk mencapai sasaran, arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro untuk menentukan bentuk konfigurasi program dan kegiatan dalam mencapai tujuan. Kebijakan merupakan kumpulan keputusan-keputusan pimpinan yang menentukan secara teliti tentang bagaimana strategi akan dilaksanakan atau dengan kata lain kebijakan merupakan pedoman pelaksanaan tindakan atau kegiatan tertentu. Kebijakan mengatur suatu mekanisme tindakan lanjutan untuk pelaksanaan pencapaian tujuan dan sasaran.

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi instansi pemerintah.

Adapun kebijakan yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018 - 2023 sesuai tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah sebagai berikut :

a. Kebijakan umum untuk strategi reformasi birokrasi :

Analisa sasaran strategis yang berpengaruh secara umum dapat diidentifikasi menjadi faktor internal dan eksternal antara lain sebagai berikut :

Faktor Internal :

1. Kekuatan (Strength)

- Komitmen dari Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah untuk mewujudkan Pemerintahan yang bersih dan berwibawa.
- Telah adanya landasan hukum yang jelas dan baku baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah yang mengatur secara jelas regulasi mengenai pengelolaan keuangan.
- Adanya landasan hukum yang mengatur keberadaan organisasi, dengan tugas pokok dan fungsi yang telah diatur secara jelas pula.
- Dukungan alokasi dana yang bersumber dari APBD untuk kegiatan operasional maupun yang bersifat incidental.
- SDM yang memadai, sarana, prasarana, peralatan dan teknologi yang tersedia memadai dan proporsional.

2. Kelemahan (Weakness)

- Ketergantungan yang sangat tinggi terhadap pemerintah pusat terkait dengan alokasi dan penyaluran dana perimbangan (DAU, DAK, dll) mulai dari perhitungan dan penetapan PMK yang selalu direvisi setiap tahunnya.

- Munculnya kebijakan dari pemerintah pusat yang kadang-kadang belum tuntas di implementasikan telah muncul kebijakan baru atau perubahan kebijakan (contoh pengelolaan dana hibah dan bantuan sosial yang telah mengalami perubahan).
- Masih belum optimalnya kinerja dan produktifitas kerja sebagai faktor akselerasi pencapaian program;
- Ketidak pastian DBH Migas.

Faktor Eksternal :

➤ Peluang (Opportunities)

- Berkembangnya partisipasi dan komunikasi publik yang akhirnya dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap birokrasi.
- Terbukanya peluang kerjasama dengan instansi vertikal di daerah (misal BPKP, DJKN, KPKNL dan BPN) maupun dengan Pemerintah Daerah lain serta Pemerintah Propinsi.
- Masih terbukanya peluang mengembangkan dan setidaknya-tidaknya mempertahankan iklim perekonomian daerah ditengah terpaan dampak krisis financial global.

➤ Tantangan / Ancaman (Threats)

- Tingkat pelayanan yang belum optimal masih merupakan tantangan yang perlu disikapi lebih jauh.

Dalam melakukan identifikasi lingkungan strategis maka langkah berikut adalah analisis stakeholder. Stakeholder yang terlibat dan berpengaruh dalam lingkungan strategis (utamanya yang eksternal) dianalisis, siapa saja mereka, apa kepentingannya, seberapa penting / urgensinya dengan visi, misi dan tujuan organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Apabila kita mengikuti alur pikir tersebut kita akan mendapati stakeholder yang penting untuk diperhatikan yang berkaitan dengan tujuan organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah antara lain :

No.	Stakeholder	Kepentingan
1.	Pemerintah Pusat (Kemenkeu/Kemendagri/Kementras migrasi Desa Tertinggal)	❖ Mengatur pengelolaan Keuangan Daerah melalui regulasi yang dikeluarkan (Undang-undang, PP, Peraturan Menteri dls).

2.	Pemerintah Provinsi	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Melakukan pembinaan dalam hal Pengelolaan Keuangan Daerah. ❖ Mengevaluasi APBD Kabupaten/Kota. ❖ Memfasilitasi koordinasi antar daerah Kabupaten / Kota.
3.	BPK / BPKP	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Melakukan audit Keuangan Daerah. ❖ Melakukan pendampingan pengelolaan Keuangan Daerah.
4.	DPRD Kab. Bojonegoro	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Membahas dan menyetujui APBD, P-APBD, Perhitungan APBD. ❖ Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan Daerah.
5.	SKPD di Lingkup Pemkab Bojonegoro	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Memperoleh pelayanan Pengelolaan Keuangan Daerah.
6.	Bank Jatim	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Menjadi mitra kerja penyedia jasa keuangan bagi Pemda.
7.	Masyarakat Umum	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Memperoleh pelayanan dalam pengelolaan Keuangan Daerah.
8.	BUMD/BUMN	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Melakukan kegiatan usaha. ❖ Menyetor sebagian keuntungan usaha kepada Pemerintah Daerah /Pemerintah. ❖ Melakukan sebagian fungsi pelayanan public.

Dengan mengetahui stakeholder penting yang terkait dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, maka kita dapat mengembangkan daftar terbatas mengenai apa yang dapat dimanfaatkan oleh institusi dan apa ancaman yang harus dihindarkan.

Selain lingkungan strategis yang dapat diidentifikasi secara jelas stakeholdernya, dalam bidang Pengelolaan Keuangan juga terdapat jenis lingkungan lain yang cukup berpengaruh, namun kita tidak dapat secara jelas mengidentifikasi siapa stakeholder yang “bertanggung jawab” antara lain :

No.	Lingkungan Strategi	Pengaruhnya
1.	Kondisi Makro ekonomi daerah (kondisi perekonomian daerah)	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Naik atau turunnya tingkat konsumsi masyarakat. ❖ Naik atau turunnya masyarakat kegiatan usaha ekonomi.
2.	Kondisi stabilitas kamtibmas Daerah	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Naik atau turunnya investasi di daerah.
3.	Stabilitas nilai tukar rupiah	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Naik atau turunnya harga minyak dunia yang berimbas pada dana bagi hasil sektor niaga

Lingkungan strategis yang berpengaruh tersebut menjadi cukup penting karena suka atau tidak kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau bahkan secara lebih luas (kondisi keuangan daerah) akan dipengaruhi oleh keberadaan dan kondisi dinamis yang mempengaruhi.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Adapun pengukuran Capaian Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan Realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah Kinerja (*performance gap*).

Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan Kinerja dimasa yang akan datang (*performance improvement*).

Dalam memberikan penilaian tingkat Capaian Kinerja setiap sasaran menggunakan skala pengukuran sebagai berikut :

- Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna progres positif, maka skala yang digunakan sebagai berikut :

Skor	Rentang Capaian	Kategori Capaian
5	91% sampai 100%	Sangat Tinggi
4	76% sampai 90%	Tinggi
3	66% sampai 75%	Sedang
2	51% sampai 65%	Rendah
1	Kurang dari 50%	Sangat Rendah

- Sebaliknya bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna progres negatif, maka skala yang digunakan sebagai berikut :

Skor	Rentang Capaian	Kategori Capaian
5	91% sampai 100%	Sangat Rendah
4	76% sampai 90%	Rendah
3	66% sampai 75%	Sedang

2	51% sampai 65%	Tinggi
1	Kurang dari 50%	Sangat Tinggi

Pengukuran Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2020 menggunakan metode sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi setiap tujuan dan sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tahun 2020 disajikan melalui beberapa metode sebagaimana berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standart nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; dan
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

CAPAIAN TERHADAP MISI KE 2 (DUA) “ MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERSIH, TRANSPARAN DAN BERTANGGUNGJAWAB “

Dalam mewujudkan misi kedua RPJMD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018 - 2023 dapat dijabarkan dalam Tujuan, Sasaran dan Indikator sebagai berikut :

a. Tujuan

Mewujudkan reformasi birokrasi untuk menghadirkan pemerintahan yang bersih, transparan dan bertanggungjawab.

b. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai dalam tujuan yang ditetapkan adalah mendapatkan OPINI WTP dari BPK dalam Pemerintahan BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Untuk mencapai sasaran dimaksud yang dilakukan badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah Kabupaten Bojonegoro adalah dengan meningkatkan kinerja pemerintah dalam pelayanan publik yang berkualitas melalui penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, akuntabel, efektif, efisien dan berbasis teknologi informasi

c. Indikator

Untuk mengukur pencapaian sasaran tersebut diatas adalah melalui indikator sebagai berikut :

1. Nilai SAKIP;
2. Opini BPK;
3. Survey Kepuasan Masyarakat;
4. Indeks Profesionalitas ASN; dan
5. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Sebagai tindaklanjut dari pelaksanaan Visi dan Misi Kabupaten Bojonegoro yang kemudian di jabarkan dalam Tujuan, Sasaran dan Indikator kinerja. Maka pelaksanaan kegiatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam memenuhi target yang ditetapkan untuk mencapai sasaran ada realisasi dari sasaran yang menjadi tugas dan tanggungjawab Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bojonegoro di sajikan dalam tabel sebagai berikut :

1. Target tercapai 100% (seratus persen) yaitu dengan mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemerika Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2019.

Tabel 3.1
Pencapaian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatkan kinerja pemerintahan	Opini BPK	WTP	WTP	100%

2. Pencapaian Indikator kinerja dengan mendapatkan opini WTP dalam pemeriksaan LKPD Kabupaten Bojonegoro telah berlangsung selama 6 (enam) kali berturut-turut.

Tabel 3.2
Perbandingan Realisasi Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi		
				Th. n-2	Th. n-1	Th. n
1	Meningkatkan kinerja pemerintahan	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP

3. Realisasi kinerja dengan mendapatkan opini WTP dalam pemeriksaan LKPD Kabupaten Bojonegoro adalah sesuai dengan target yang ditetapkan RPJMD dan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja s/d akhir Periode RENSTRA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	WTP	WTP	Tingkat Kemajuan
1	Meningkatkan kinerja pemerintahan	Opini BPK	WTP	WTP	-

4. Target Nasional bagi daerah dalam Pengelolaan Keuangan adalah dengan mendapatkan opini WTP oleh BPK dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah telah dipenuhi dengan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro mendapatkan Opini WTP.

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2020	Realisasi Nasional	Ket.
1	Meningkatkan kinerja pemerintahan	Opini BPK	WTP	WTP	-

5. Analisis penyebab keberhasilan dan hal-hal yang perlu ditingkatkan dalam mempertahankan opini WTP oleh BPK atas LKPD adalah dengan melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

- sistem pengendalian internal yang memadai;
- meminimalisir salah saji yang material atas pos-pos laporan keuangan;
- laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan SAP.

Tabel 3.5
Analisis Capaian dan Solusi Perbaikan

No	Sasaran Strategis	Tercapai/Tidak	Penyebab	Solusi Perbaikan atau Peningkatan
1	Meningkatkan kinerja pemerintahan	Tercapai	Sistem pengendalian internal memadai, tidak ada salah saji yang material atas pos-pos laporan keuangan dan laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan SAP	Meningkatkan sistem pengendalian internal, meminimalisir salah saji atas pos-pos laporan keuangan dan menyajikannya sesuai SAP

6. Pelaksanaan program dan kegiatan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro terutama dalam melaksanakan belanja daerah dilakukan dengan prinsip efektif, efisien dan ekonomis. Dalam hal ini target program dan kegiatan tetap tercapai 100% tetapi anggaran yang digunakan di minimalisir seefisien mungkin, pada tahun 2020 di BPKAD terdapat efisiensi sebesar 21,19% atau 2.320.668.219,10 dari total pagu anggaran 10.949.674.394,10

Tabel 3.6
Pencapaian Kinerja dan Anggaran

No	Sasaran/Program	Indikator	Kinerja			Anggaran		
			Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Alokasi	Realisasi	Capaian
Sasaran Meningkatkan Kinerja Pemerintahan								
1	Pelayanan Umum Perangkat	Persentase layanan umum perangkat	100	100	100	1.765.675.029,00	2.445.207.484,00	81,84

	Daerah	daerah yang tersedia sesuai mutu dan kebutuhan						
2	Pengelolaan Anggaran Daerah	Persentase OPD menginput anggaran tepat waktu	100	100	100	5.612.412.550,10	4.887.121.091,00	87,08
3	Akuntansi dan Investasi	Persentase kesesuaian laporan keuangan OPD	100	100	100	807.319.315,00	518.232.800,00	64,19
4	Pelayanan Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas Daerah	Persentase SPM/SP2d yang dikeluarkan	100	100	100	728.154.500,00	650.741.850,00	89,37
5	Pelayanan Umum Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan BMD	100	100	100	2.036.113.000,00	1.127.802.950,00	55,339

Tabel 3.7
Efisiensi Penggunaan Sumberdana

No	Sasaran/Program	Indikator Kinerja	% Capaian	% Serapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Sasaran Meningkatkan Kinerja Pemerintahan					
1	Pelayanan Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan umum perangkat daerah yang tersedia sesuai mutu dan kebutuhan	100	81,84	18,16
2	Pengelolaan Anggaran Daerah	Persentase OPD menginput anggaran tepat waktu	100	87,08	12,92
3	Akuntansi dan Investasi	Persentase kesesuaian laporan keuangan OPD	100	64,19	35,81
4	Pelayanan Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas Daerah	Persentase SPM/SP2d yang dikeluarkan	100	89,37	10,63
5	Pengelolaan Aset Daerah	Persentase pengelolaan BMD	100	55,39	44,61

7. Analisis program/kegiatan dalam menunjang keberhasilan pencapaian kinerja adalah :
1. Dengan tercukupinya kebutuhan pelayanan umum, kepegawaian serta sarana dan prasarana kantor.
 2. Penganggaran pendapatan dan belanja oleh OPD dilakukan dengan rekening belanja yang tepat sesuai ketentuan dan penetapan APBD tepat waktu.
 3. Menyusun laporan keuangan sesuai prinsip kebijakan akuntansi pemerintah daerah sehingga untuk memperoleh predikat WTP dalam Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah oleh BPK.
 4. Mencukupi anggaran sesuai kebutuhan OPD dalam pelaksanaan kegiatan serta pengelolaan manajemen kas yang efektif.
 5. Terlaksananya tertib pengelolaan barang milik daerah mulai dari proses perencanaan, penatausahaan, pelaporan dan penghapusan aset daerah.

Tabel 3.8
Analisis Program/Kegiatan Penunjang

No	Sasaran/Indikator Sasaran	Program/Kegiatan	Anggaran	Analisa
1	Meningkatnya layanan umum perangkat daerah	Persentase layanan umum perangkat daerah yang tersedia sesuai mutu dan kebutuhan	1.765.675.029,00	Merupakan penunjang untuk tercapainya sasaran meningkatnya pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan barang milik daerah yang berfungsi untuk mencukupi kebutuhan pelayanan umum, kepegawaian serta sarana dan prasarana kantor
2	Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah	Persentase OPD menginput anggaran tepat waktu	5.612.412.550,10	Sebagai pendukung pengelolaan keuangan daerah dibidang penganggaran yang bertugas untuk mengevaluasi penganggaran pendapatan dan belanja SKPD yang

				agar tepat rekening belanjanya sesuai ketentuan dan penetapan APBD tepat waktu
3		Persentase kesesuaian laporan keuangan OPD	807.319.315,00	Sebagai pendukung pengelolaan keuangan daerah dibidang pelaporan yang bertugas untuk menyusun laporan keuangan sesuai prinsip kebijakan akuntansi pemerintah daerah sehingga memperoleh predikat WTP
4		Persentase SPM/SP2d yang dikeluarkan	728.154.500,00	Sebagai pendukung pengelolaan keuangan daerah dibidang penatausahaan keuangan dandas daerah yang bertugas untuk mencukupi anggaran sesuai kebutuhan OPD dan melaksanakan kegiatan serta mengelola manajemen kas di RKUD
5	Meningkatnya pengelolaan barang milik daerah	Persentase pengelolaan BMD yang teridentifikasi	2.036.113.000,00	Sebagai Pendukung Pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah mulai dari proses perencanaan, penatausahaan, pelaporan dan penghapusan aset daerah

B. REALISASI ANGGARAN

Realisasi anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2020 adalah sebesar 78,81% atau Rp. 8.629.006.0175,00 dari total pagu anggaran sebesar Rp.10.949.674.384,10 dengan efisiensi sebesar Rp. 2.320.668.219,00 atau 21,19%

Tabel 3.9
Realisasi Anggaran Tahun 2020

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Pelayanan Umum Perangkat Daerah	1.765.675.029,00	1.445.107.484,00
2	Pengelolaan Anggaran Daerah	5.612.412.550,10	4.887.121.091,00
3	Akuntansi dan Investasi	807.319.315,00	518.232.800,00
4	Pelayanan Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas Daerah	728.154.500,00	650.741.850,00
5	Pengelolaan Aset Daerah	2.036.113.000,00	1.127.802.950,00
JUMLAH		10.949.674.394,10	8.629.006.175,00

C. CAPAIAN INDIKATOR SASARAN RPJMD

Untuk target RPJMD Kabupaten Bojonegoro khususnya dalam menjalankan misi kedua yaitu Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan bertanggungjawab juga telah dapat tercapai yaitu dengan memperoleh opini wajar tanpa pengecualian oleh Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2019 dan merupakan keenam kalinya secara berturut-turut.

Tabel 3.10
Realisasi Indikator RPJMD Tahun 2020

NO	VISI DAN MISI	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI
1	VISI Menjadikan Bojonegoro sumber ekonomi kerakyatan dan Sosial Budaya Lokal untuk terwujudnya masyarakat yang beriman, sejahtera dan berdaya saing MISI Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan bertanggungjawab	Meningkatkan Kinerja Pemerintahan	Opini BPK	WTP	WTP

BAB IV PENUTUP

Dari uraian evaluasi kinerja, permasalahan dan solusi selama tahun 2020, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai perangkat daerah (OPD) dan pelaksanaan tugas fungsional selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) maupun Bendahara Umum Daerah (BUD) telah dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, namun masih perlu untuk di tingkatkan.

Sebagai kesimpulan ada beberapa catatan penting yang mempengaruhi pelaksanaan APBD tahun 2020 antara lain :

- Dengan adanya pandemi COVID 19 yang melanda dunia maka mempengaruhi kebijakan keuangan di Indonesia termasuk dalam pelaksanaan APBD dimana kegiatan diamanatkan agar difokuskan untuk penanganan COVID 19, namun karena ditentukannya prosentase anggaran yang harus difokuskan maka mengakibatkan rendahnya prosentase penyerapan di Pemerintah Kabupaten Bojonegoro yang disebabkan kebutuhan untuk penanganan COVID 19 jauh lebih kecil daripada anggaran yang tersedia.
- Kegiatan rekonsiliasi belanja dan pendapatan membutuhkan waktu yang cukup lama, hal ini disebabkan belum optimalnya kemampuan bendahara dan Pejabat Penata Usahaan Keuangan (PPK-OPD) dalam pemahaman terhadap kebijakan akuntansi, Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis AkruaI dan Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis AkruaI.
- Sekalipun jadwal penyusunan anggaran tergantung pada Tim Anggaran, DPRD dan OPD lain, tapi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) harus terus membantu agar dapat terlaksana secara tepat waktu.
- Pada masa lalu memang terjadi tidak tertibnya manajemen aset sehingga puluhan tahun tidak terdata dan tersertifikasi, oleh karena itu BPKAD terus berupaya melakukan pendataan barang daerah dan aplikasi SIMDA.
- Terhadap aset tanah yang sudah tercatat/terdata di dalam Simda BMD namun belum bersertifikat a.n Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, BPKAD setiap tahun selalu melaksanakan proses persertifikatan tanah dan terus mengoptimalkan kegiatan dimaksud.

Dalam upaya peningkatan kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen pada tahun yang akan datang perlu dilakukan strategi, sebagai berikut:

- Komitmen semua ASN dan *stakeholder* / pemangku kepentingan dalam melaksanakan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- Peran APIP dalam pemantauan penerapan SPI di masing-masing OPD untuk dioptimalkan.
- Perbaikan yang lebih optimal dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.
- Perbaikan Kinerja Pengelola Keuangan, melalui Program Peningkatan kapasitas aparatur, khususnya aparatur pengelola keuangan, maupun melalui upaya perbaikan sistem dan kebijakan akuntansi serta manajemen aset.
- Perbaikan sistem melalui rencana aksi (*action plan*), agar proses perbaikan yang dilakukan jelas, terarah terukur dan terpadu, sehingga kelemahan dalam pengelolaan keuangan sebelumnya tidak terjadi lagi di masa yang akan datang.
- Memprioritaskan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang memahami pengelolaan dan pelaporan keuangan dan aset.
- Tertib penyampaian Laporan keuangan.
- Tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD).
- Mengadakan pelatihan / bimtek mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah pada SKPD.
- Menyelenggarakan Bimtek dan Sosialisasi terkait Surat Edaran Penyusunan Laporan Keuangan.
- Melakukan sinkronisasi data keuangan setiap bulan dengan OPD terkait.
- Melakukan pendampingan ke tiap OPD dalam pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) dan pendampingan penyusunan laporan aset.
- Menyelenggarakan Bimtek Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD).

Oleh sebab itu, perencanaan yang matang dan sistematis serta pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro khususnya untuk pekerjaan fisik harus lebih menjadi perhatian OPD pada tahun yang akan datang.

Bojonegoro, 31 Desember 2020

**Pj. KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH**



LULUK ALIFAH, SE.,MM
Pembina
NIP. 19691128 200312 2 008



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Pj. KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **LULUK ALIFAH, SE, MM**

Jabatan : Pjt. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **ANNA MU'AWANAH**

Jabatan : Bupati Bojonegoro

sebagai atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bojonegoro, 16 Maret 2020

Pihak Kedua,
BUPATI BOJONEGORO

ANNA MU'AWANAH

Pihak Pertama
Pj. KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH

LULUK ALIFAH, SE, MM
Pembina
NIP.19691128 200312 2 008

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Terwujudnya tertib pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Keuangan OPD yang Tepat waktu dan sesuai hasil rekonsiliasi	100 %
Terwujudnya tertib pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah data BMD pada Unit Pengelola Barang yang teridentivikasi	100%

PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
2	3	4
Program Pelayanan Umum Perangkat Daerah	2.447.177.882,00	
Program Pengelolaan Anggaran Daerah	5.884.792.426,10	
Program Akuntansi dan Investasi	1.037.615.715,00	
Program Pelayanan Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas Daerah	1.081.982.430,00	
Program Pengelolaan Aset Daerah	2.436.638.542,40	

Bojonegoro, 16 Maret 2020

BUPATI BOJONEGORO



ANNA MU'AWANAH

**Pj. KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH**



LULUK ALIFAH, SE, MM
Pembina
NIP.19691128 200312 2 008



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **LULUK ALIFAH, SE, MM.**

Jabatan : Pj. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **ANNA MU'AWANAH**

Jabatan : Bupati Bojonegoro

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bojonegoro, 12 Oktober 2020

**Pihak Kedua,
BUPATI BOJONEGORO**

ANNA MU'AWANAH

**Pihak Pertama
Pj. KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

LULUK ALIFAH, SE, MM
Pembina

NIP.19691128 200312 2 008

PERJANJIAN KINERJA P-APBD TAHUN 2020
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BOJONEGORO

Sasaran Strategis (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
Terwujudnya tertib pengelolaan Keuangan Daerah	1. Persentase Laporan OPD yang tepat waktu sesuai hasil rekonsiliasi	100 %
Terwujudnya tertib pengelolaan Barang Milik Daerah	2. Persentase data Barang Milik Daerah yang teridentifikasi	100%

NO.	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
	2	3	4
1	Program Pelayanan Umum Perangkat Daerah	1.765.675.029,00	
2	Program Pengelolaan Anggaran	5.612.412.550,00	
3	Program Akuntansi dan Investasi	807.319.315,00	
4	Program Pelayanan Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas Daerah	728.154.500,00	
5	Program Pengelolaan Aset Daerah	2.036.113.000,00	

Bojonegoro, 12 Oktober 2020

**Pihak Kedua,
BUPATI BOJONEGORO**



ANNA MU'AWANAH

**Pihak Pertama
Pj. KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH**



LULUK ALIFAH, SE, MM
Pembina

NIP.19691128 200312 2 008

***CAPAIAN PRESTASI BPKAD 2020**

Kegiatan	Prestasi Yang Dicapai	Keterangan
2	3	4
Pelaporan Hasil Rekonsiliasi Pajak Pusat yang Dibayarkan atas beban APBD	Pemerintah Kabupaten Tercepat	KPPN
Penyusunan dan Menyajikan Laporan Keuangan Daerah dengan Opini WTP	WTP 6 kali berturut-turut	Kementrian Keuangan

Bojonegoro, 31 Desember 2020
Pj. KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BOJONEGORO



LULUK ALIFAH, SE.,MM
Pembina

NIP. 19691128 200312 2 008